

Pertemuan Koordinasi Pengembangan Industri Alat Kesehatan, 13 Juni 2017



# Investasi Industri Alat Kesehatan



# INVESTASI INDUSTRI ALAT KESEHATAN

**165,8**

**Rp. Triliun**  
*Realisasi Investasi*

**+13,2%**

*Pertumbuhan  
realisasi  
investasi (y/y)*

**+ 36,5%**

*Pertumbuhan  
PMDN (y-o-y)*

**+ 0,9%**

*Pertumbuhan PMA  
(y-o-y)*

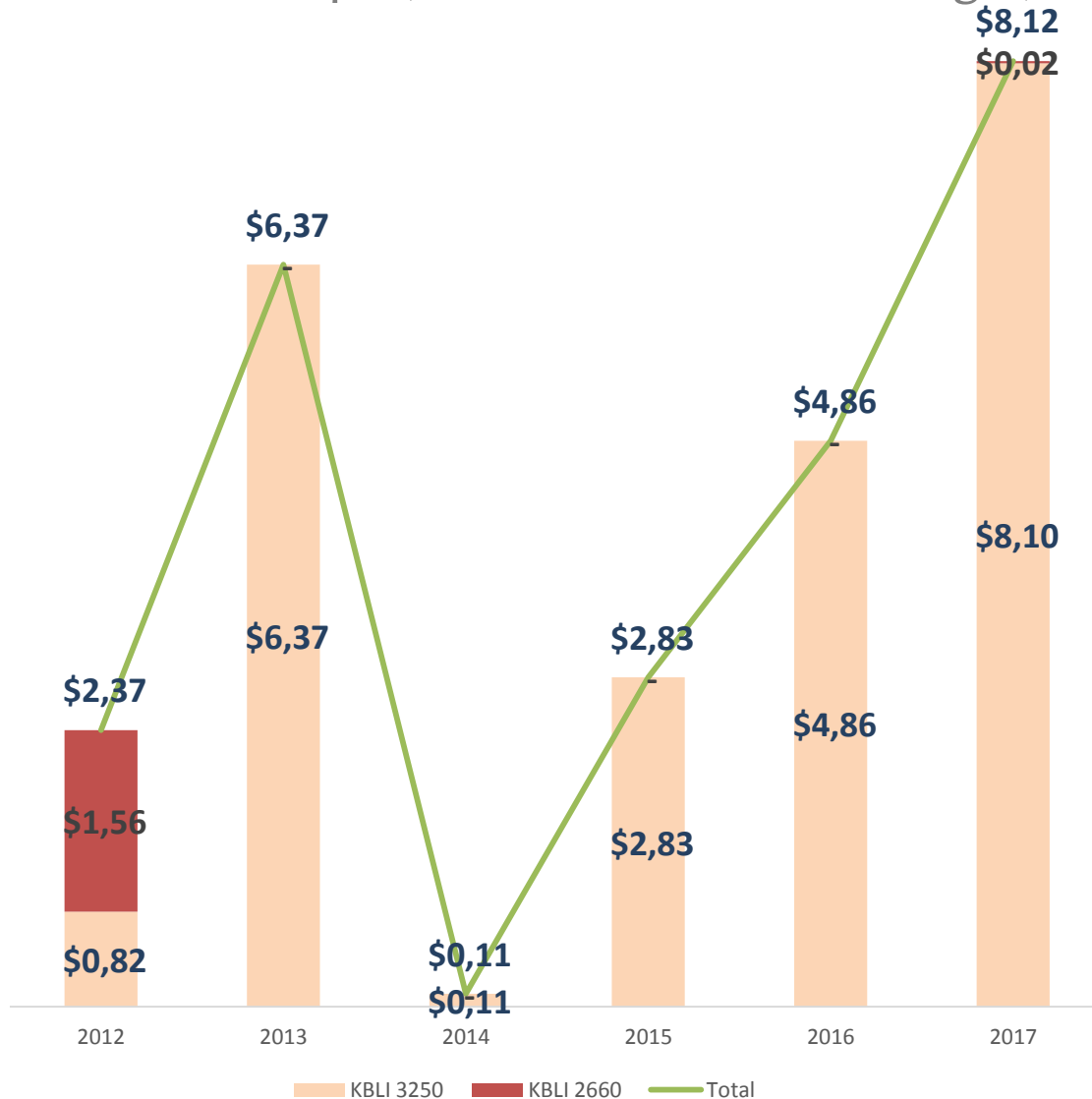
**Perkembangan Investasi**

**Realisasi Investasi Jan – Mar 2017**



# Industri Alat Kesehatan

Sesuai Capex, tidak termasuk sektor keuangan, minyak, dan gas (US\$ Juta)



Data invetsasi Industri Alat Kesehatan mencakup KBLI:.

- (2660 - 2009) Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi
- (3250 - 2009) Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya

- Perkembangan kinerja penanaman modal sektor industri alat kesehatan sejak 2012 cenderung mengalami peningkatan meski turun di tahun 2014.
- Total realisasi : US\$ 24,67 juta
- Total proyek : 94 proyek
- PMA mendominasi realisasi penanaman modal dengan *share* 55%, dan sisanya PMDN sebesar 45%.

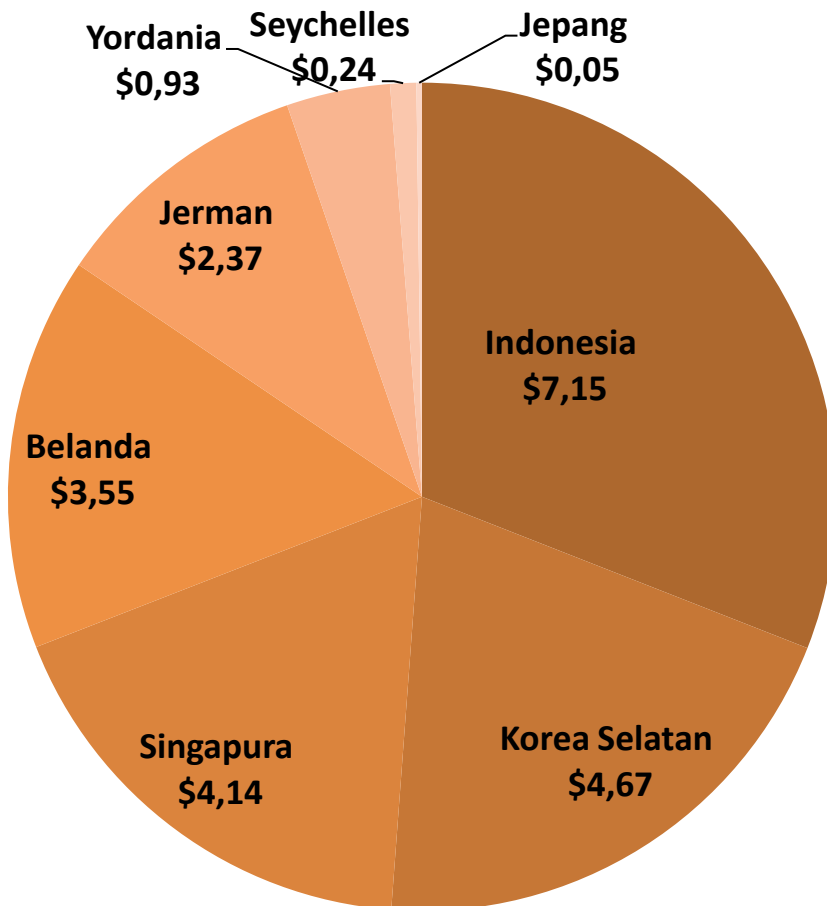


# Industri Alat Kesehatan

Sesuai Capex, tidak termasuk sektor keuangan, minyak, dan gas (US\$ Juta)

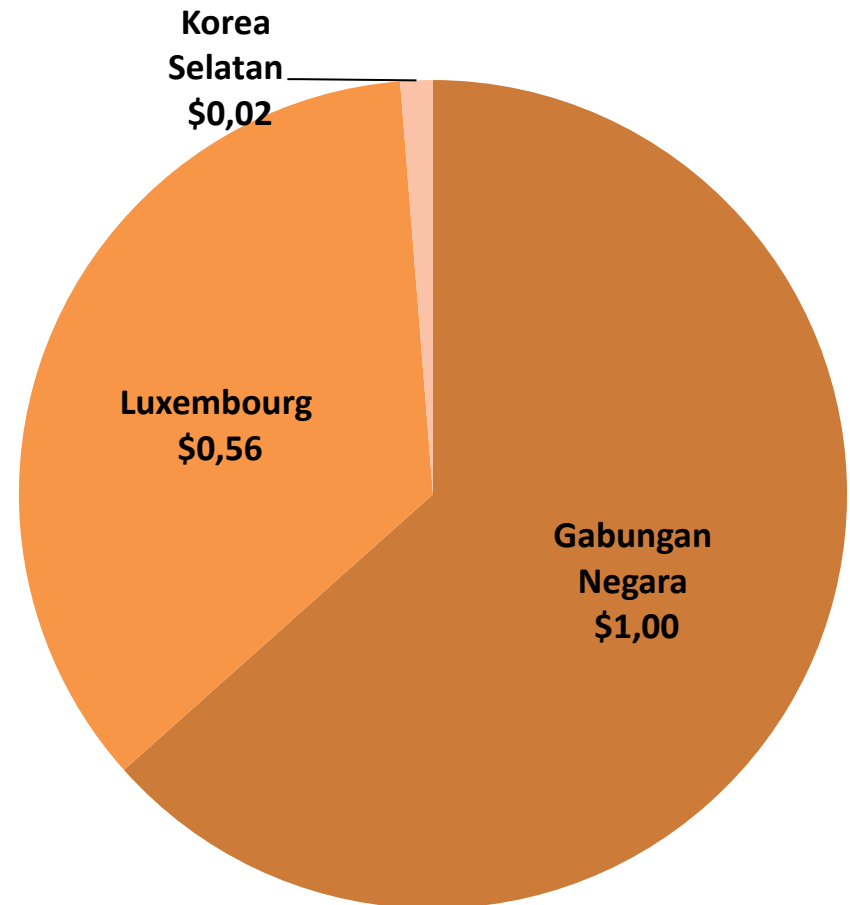
Investasi per negara

KBLI 3250 - Industri Peralatan Kedokteran Dan  
Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya



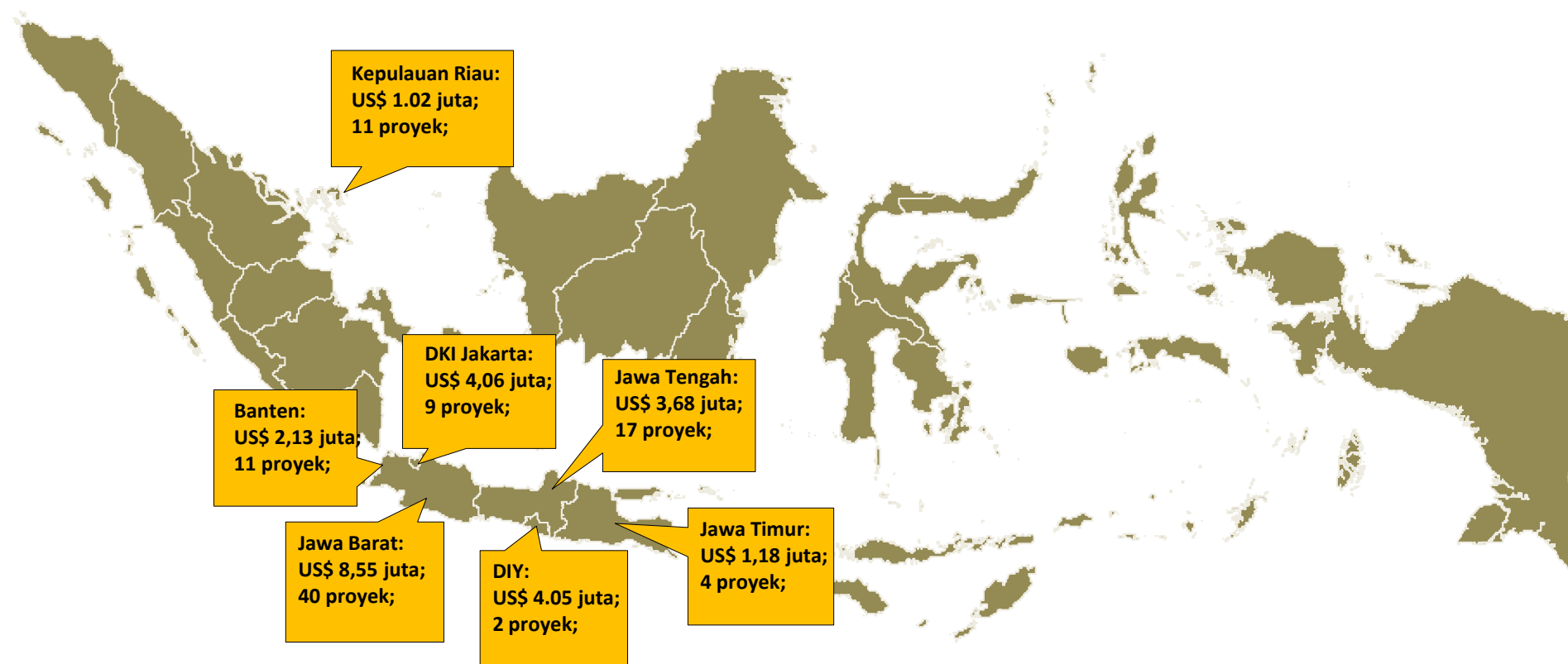
Investasi per negara

KBLI 2660 - Industri Peralatan Iradiasi,  
Elektromedikal Dan Elektroterapi



## Realisasi Investasi Berdasarkan Lokasi

Sesuai Capex, tidak termasuk sektor keuangan, minyak, dan gas (US\$ Juta)

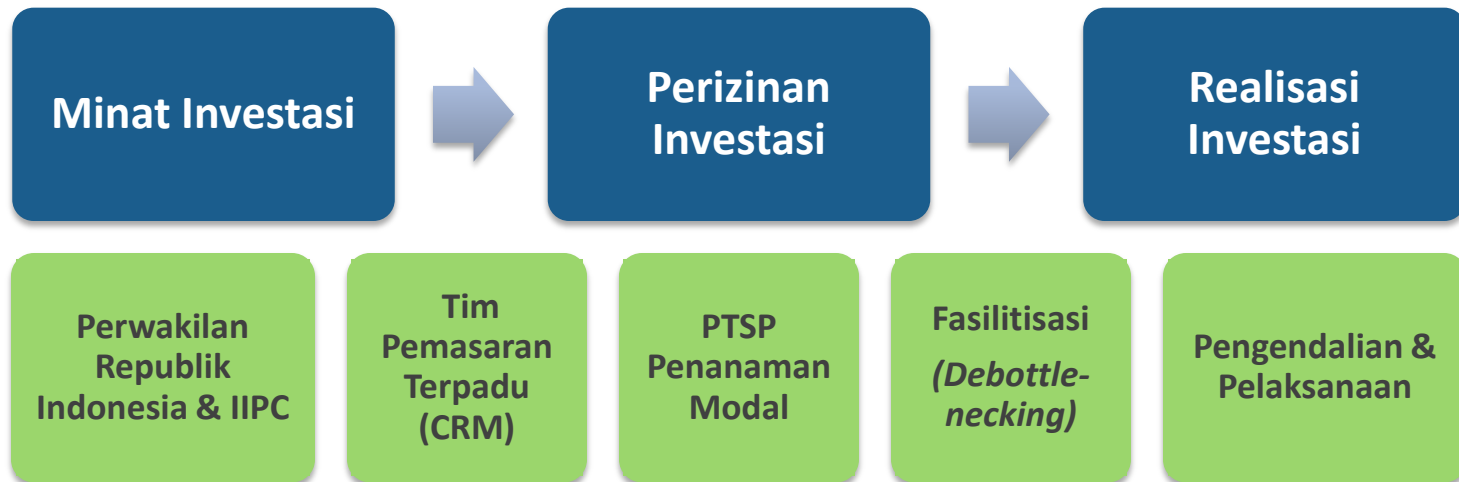




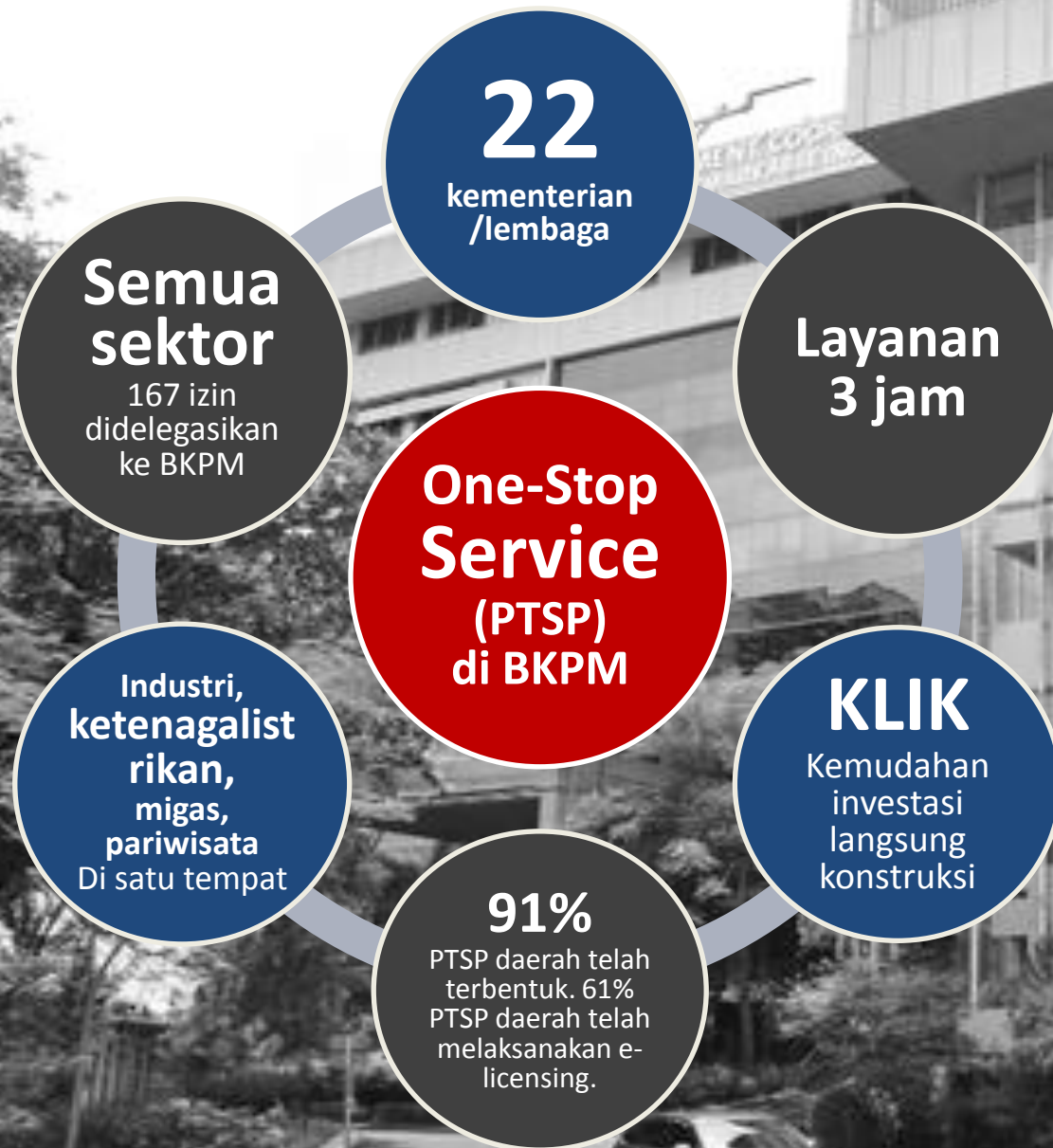
# FASILITASI INVESTASI BKPM BIDANG INDUSTRI ALAT KESEHATAN



## Pelayanan *End-to-End* kepada Investor



# Reformasi Pelayanan Investasi



**Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu (PTSP)  
Pusat di BKPM**

## Implementasi PTSP Pusat di BKPM:

(Perpres No. 97 of 2014)  
Integrasi 22 kementerian  
dan lembaga



**Kementerian ESDM**  
42 izin migas, 9 izin batubara dan mineral, 6 izin kelistrikan dan 4 izin geothermal.



KEMENTERIAN KEHUTANAN

**Kementerian Kehutanan dan LH**  
35 izin usaha



KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN  
REPUBLIK INDONESIA

**Kementerian Industri**  
6 izin usaha



**Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN**  
Penerbitan booking lahan untuk investasi



**Kementerian Pertahanan**  
Layanan konsultasi



MINISTRY OF TRADE

**Kementerian Perdagangan**  
5 izin



KEMENTERIAN Pertanian

**Kementerian Pertanian**  
5 izin usaha



**Kementerian Keuangan**  
Fasilitas impor bahan baku, barang modal dan mesin untuk produksi



**Kementerian Perhubungan**  
7 izin usaha



**Kementerian Hukum dan HAM**  
1 izin usaha



**Kementerian Kesehatan**  
9 izin usaha



**Kementerian Pariwisata**  
9 izin usaha



KEMKOMINFO

**Kementerian Komunikasi dan Informatika**  
5 izin usaha



**Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi**  
3 izin usaha dan izin prinsip



**Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat**  
7 izin usaha



**Kementerian Kelautan dan Perikanan**  
2 izin usaha



**Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan**  
2 izin usaha



**Kepolisian**  
6 izin usaha  
Jasa keamanan

**Instansi Lainnya:** BPOM,  
BSN, Lembaga Sandi  
Negara, PLN



1

## Layanan Izin Investasi 3 Jam (I23J)

- **Kriteria:** Nilai minimal Investasi Rp 100 miliar atau Penyerapan Tenaga Kerja minimal 1.000 orang
- **8 + 1 Produk Izin:**
  1. Izin Investasi
  2. Akta Pendirian + SK KumHAM
  3. NPWP
  4. TDP
  5. APIP
  6. NIK
  7. RPTKA
  8. IMTA
  9. Informasi Blocking Tanah

2

## Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)

- Tidak ada kriteria minimal investasi dan penyerapan tenaga kerja
- Berlokasi di Kawasan Industri tertentu
- **Konstruksi langsung sambil secara paralel proses perizinan pelaksanaan (a.l: IMB dan AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan). Wajib dilengkapi saat siap produksi komersial.**
- SK Ka BKPM No 24/2016, telah ditetapkan 14 KI KLIK.

3

## Layanan Jalur Hijau



- Percepatan pengeluaran importasi mesin/barang/peralatan dr 3-5 hari mjd 30 menit
- Mengajukan permohonan ke BKPM u/ ditetapkan Dirjen BC
- **Lampiran Permohonan:** Data perusahaan, IP, LKPM, Rencana Pembangunan, Izin terkait lain
- **Surat pernyataan:**
  1. Perusahaan tahap konstruksi
  2. Impor a.n perusahaan sendiri
  3. Jenis, tipe, dan spesifikasi barang sesuai dok impor
  4. Konsekuensi ditanggung perusahaan

# Layanan Izin Investasi 3 Jam

Hingga Desember 2016, 250 perusahaan telah mendapatkan fasilitas izin investasi 3 jam with total investment of Rp. 817.8 triliun



- **Tiba** di BKPM langsung dari bandara.
- **Konsultasi** dengan Direktur Pelayanan Perizinan.
- **Menyerahkan** dokumen dan data yang dipersyaratkan.

## Persyaratan

Investasi Minimal  
**Rp. 100 Miliar**  
(US\$ 8 juta) dan atau menggunakan  
**1.000 Tenaga Kerja Indonesia**

## 9 produk diterbitkan:

- Izin Investasi
- Akta Pendirian Perusahaan
- NPWP
- TDP / Tanda Daftar Perusahaan
- APIP / Angka Pengenal Importir Produsen
- NIK / Nomor Induk Kependudukan
- RPTKA / Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- IMTA / Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- Surat Ketersediaan Lahan



**Menunggu** di ruang tunggu, sementara dokumen kelengkapan diproses oleh BKPM, Notaris, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Lainnya di PTSP.



**Memperoleh** delapan dokumen dan surat ketersediaan lahan dalam 3 jam untuk memulai bisnis.

## Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)

Investor dapat langsung melakukan konstruksi proyek sambil secara paralel mengurus izin mendirikan bangunan untuk kawasan industri. Layanan ini merupakan kerjasama dan koordinasi antara **Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**



**Memperoleh** izin investasi dari PTSP Pusat maupun Daerah

- **Survei** ketersediaan lahan pada kawasan industri tertentu
- **Memesan dan Memperoleh** lahan di kawasan industri.

## Tanpa Persyaratan

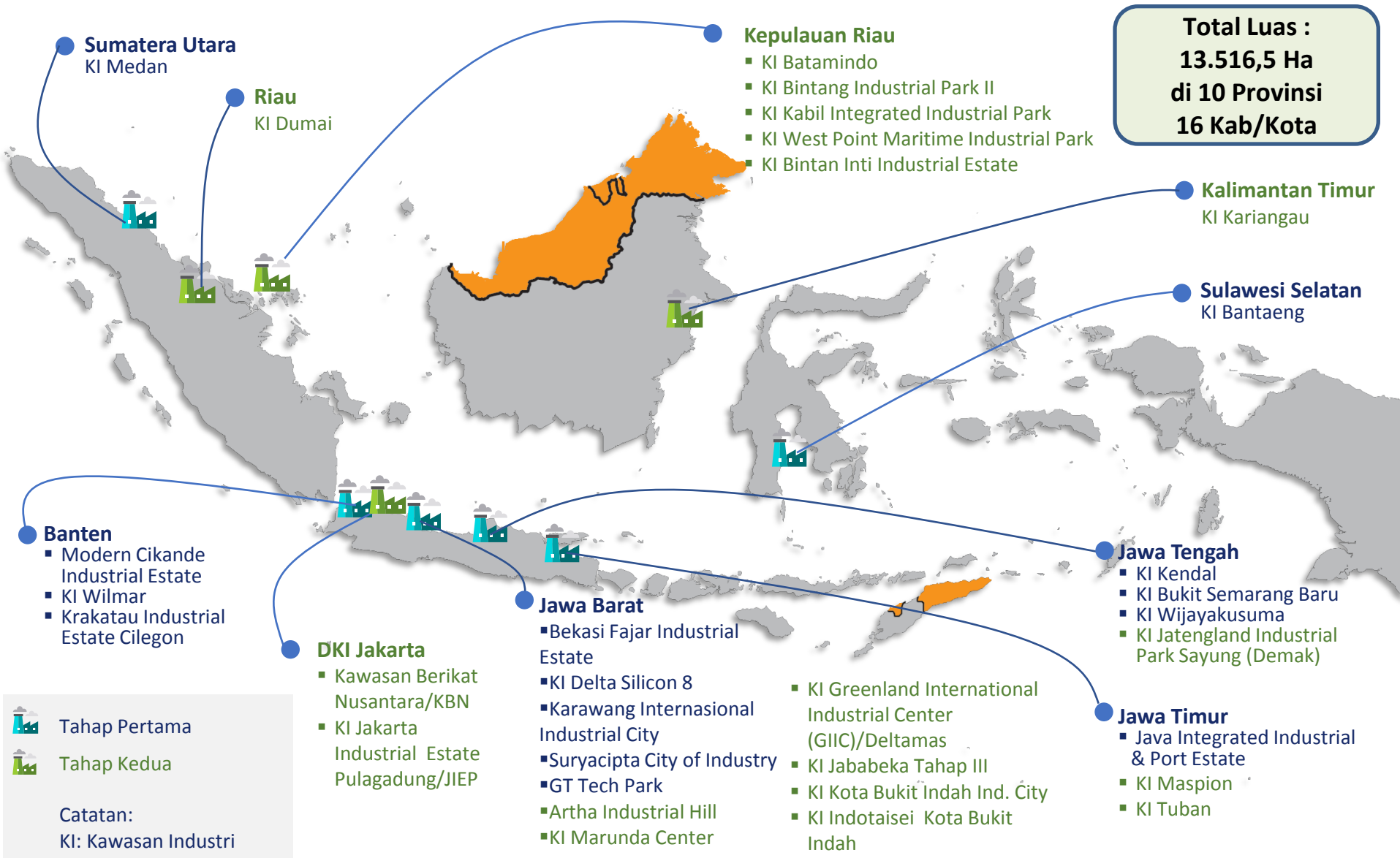
- Tidak ada minimal besar investasi dan jumlah tenaga kerja yang diserap.
- IMB dapat diperoleh bersamaan dengan proses konstruksi

- **Memulai konstruksi proyek.** Tidak terdapat perizinan yang dibutuhkan.
- **Mengajukan** IMB serta UKL/UPL, secara paralel dengan proses konstruksi.

# 32 Kawasan Industri Lokasi KLIK di 10 Provinsi



Ditetapkan melalui SK Ka. BKPM No. 24/2016 jo. SK Ka. BKPM No. 17/2017



## PENYELESAIAN KEPABEANAN

(CUSTOMS CLEARANCE)

### 4 status pengecekan kepabeanan:

• **Jalur Merah** untuk perusahaan baru. Dilakukan pemeriksaan fisik & dokumen sebelum barang dipindahkan dari pelabuhan.

### • Jalur Kuning

Hanya dilakukan pengecekan dokumen sebelum barang dipindahkan dari pelabuhan.

### • Jalur Hijau

Pengecekan dokumen dilakukan setelah barang dipindahkan dari pelabuhan.

• **Prioritas Mitra Utama** untuk perusahaan dengan track record yang terbukti baik. Tidak diperlukan pengecekan.

### Fasilitas Baru:

## Peningkatan Status

dari jalur merah ke jalur hijau untuk perusahaan baru yang dalam tahap konstruksi

# Fasilitas Impor Barang Modal

*Percepatan dan kepastian dalam pemrosesan customs clearance*

*Lebih cepat dan pasti*

- Tidak perlu screening barang modal.
- Memotong waktu pemrosesan dari 3-5 hari menjadi hanya 30 menit.

*Persyaratan mudah*

- Proyek dalam tahap konstruksi
- Memenuhi kewajiban pelaporan LKPM Triwulanan ke BKPM
- Rekomendasi dari BKPM





# PROSEDUR INVESTASI BIDANG INDUSTRI ALAT KESEHATAN

# PELAYANAN PERIZINAN di PTSP PUSAT BKPM



**persiapan**

**konstruksi**

**produksi**



## IZIN PRINSIP/ IZIN INVESTASI

diatur dalam Perka 14/2015  
tentang Izin Prinsip Penanaman Modal



## FASILITAS YANG DAPAT DIAJUKAN



### PEMBEBASAN BEA MASUK IMPOR

diatur dalam Perka 16/2015  
tentang Fasilitas Penanaman Modal



### TAX ALLOWANCE

diatur dalam Perka 18/2015  
tentang Fasilitas Pajak  
Penghasilan untuk  
Penanaman Modal



### TAX HOLIDAY

diatur dalam Perka 19/2015  
tentang Pengurangan Pajak  
Penghasilan Badan



## IZIN USAHA

diatur dalam Perka 15/2015  
tentang Perizinan dan Non-  
Perizinan Penanaman  
Modal



**PERIZINAN  
DAERAH**



**PERIZINAN  
TEKNIS (bila ada)**

**Contact Centre**  
0807-100-BKPM (2576)  
[info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)



## Izin Investasi Online

SPIPSE/NSWi online merupakan sebuah aplikasi pelayanan perizinan online bagi investor yang akan menanam modal di Indonesia.

**11 izin di BKPM dapat diproses secara online sejak 15 Desember 2014**

| No | Perizinan                                      | SOP           |
|----|------------------------------------------------|---------------|
| 1  | Izin Prinsip Investasi                         | 3 hari kerja  |
| 2  | Izin Prinsip Investasi Perluasan               | 3 hari kerja  |
| 3  | Izin Prinsip Investasi Perubahan               | 5 hari kerja  |
| 4  | Izin Usaha Investasi Penggabungan              | 5 hari kerja  |
| 5  | Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KKPA) | 5 hari kerja  |
| 6  | Izin Usaha Investasi                           | 7 hari kerja  |
| 7  | Izin Usaha Investasi Perluasan                 | 7 hari kerja  |
| 8  | Izin Usaha Investasi Perubahan                 | 7 hari kerja  |
| 9  | Fasilitas Bea Masuk Mesin                      | 7 hari kerja  |
| 10 | Fasilitas Bea Masuk Bahan Baku                 | 7 hari kerja  |
| 11 | Izin Prinsip Penggabungan                      | 10 hari kerja |





## Pengajuan Online :

1. Izin Prinsip (IP) and Izin Usaha (IU)
2. IP & IU Perluasan
3. IP & IU Perubahan
4. IP & IU Penggabungan
5. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA)
6. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (KP3A)



## Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Indonesia Investment  
Coordinating Board

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44  
Jakarta 12190 - Indonesia

**t** . +62 21 525 2008

**f** . +62 21 525 4945

**e** . [info@bkpm.go.id](mailto:info@bkpm.go.id)

[www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)





## Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Persektor

Periode Between Jan 1, 2012 and Mar 31, 2017

### KBLI 3250 - Industri Peralatan Kedokteran Dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya

|                 | 2012   |                | 2013   |                | 2014   |                | 2015   |                | 2016   |                        | 2017   |                | Total  |                        |
|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------------|--------|----------------|--------|------------------------|
|                 | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | Investasi (US\$. Juta) | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | Investasi (US\$. Juta) |
| Indonesia       | 0      | -              | 3      | 4,05           | 0      | -              | 1      | -              | 4      | 0,08                   | 3      | 3,02           | 11     | 7,15                   |
| Korea Selatan   |        |                | 4      | 1,68           | 4      | 0,11           | 8      | 1,90           | 8      | 0,99                   | 2      | -              | 26     | 4,67                   |
| Singapura       | 1      | 0,82           | 1      | 0,36           | 2      | -              | 3      | 0,93           | 6      | 1,50                   | 2      | 0,52           | 15     | 4,14                   |
| Belanda         | 1      | -              | 2      | -              | 1      | -              | 1      | -              | 3      | -                      | 1      | 3,55           | 9      | 3,55                   |
| Jerman          |        |                |        |                |        |                |        |                | 6      | 1,59                   | 1      | 0,78           | 7      | 2,37                   |
| Yordania        |        |                |        |                |        |                |        |                | 2      | 0,70                   | 1      | 0,23           | 3      | 0,93                   |
| Seychelles      |        |                | 3      | 0,24           | 1      | -              |        |                |        |                        |        |                | 4      | 0,24                   |
| Jepang          |        |                | 1      | 0,05           |        |                | 1      | -              | 1      | -                      |        |                | 3      | 0,05                   |
| Australia       |        |                |        |                |        |                | 1      | -              | 1      | -                      |        |                | 2      | -                      |
| Malaysia        |        |                | 1      | -              |        |                | 1      | -              | 1      | -                      |        |                | 3      | -                      |
| Gabungan Negara |        |                |        |                | 1      | -              | 4      | -              |        |                        |        |                | 5      | -                      |
| Total(Negara)   | 2      | 0,82           | 15     | 6,37           | 9      | 0,11           | 20     | 2,83           | 32     | 4,86                   | 10     | 8,10           | 88     | 23,10                  |

## Perkembangan Realisasi Investasi Berdasarkan Negara Persektor

Periode Between Jan 1, 2012 and Mar 31, 2017

### KBLI 2660 - Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal Dan Elektroterapi

|                 | 2012   |                | 2015   |                | 2016   |                | 2017   |                | Total  |                        |
|-----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------------|
|                 | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | stasi (US\$. . | Proyek | Investasi (US\$. Juta) |
| Gabungan Negara | 1      | 1,00           |        |                |        |                |        |                | 1      | 1,00                   |
| Luxembourg      | 1      | 0,56           |        |                |        |                |        |                | 1      | 0,56                   |
| Korea Selatan   |        |                |        |                |        |                | 1      | 0,02           | 1      | 0,02                   |
| Singapura       |        |                |        |                | 2      | -              |        |                | 2      | -                      |
| Jepang          |        |                | 1      | -              |        |                |        |                | 1      | -                      |
| Total(Negara)   | 2      | 1,56           | 1      | -              | 2      | -              | 1      | 0,02           | 6      | 1,58                   |

## Perkembangan Realisasi Investasi PMA & PMDN Berdasarkan Lokasi

Periode Between Jan 1, 2012 and Mar 31, 2017

|                               | 2012   |                      | 2013   |                      | 2014   |                      | 2015   |                      | 2016   |                      | 2017   |                      | Total  |                      |
|-------------------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|--------|----------------------|
|                               | Proyek | Investasi US\$. Ribu | Proyek | Investasi US\$. Ribu | Proyek | Investasi US\$. Ribu | Proyek | Investasi US\$. Ribu | Proyek | Investasi US\$. Ribu | Proyek | Investasi US\$. Ribu | Proyek | Investasi US\$. Ribu |
| Jawa Barat                    | 2      | 557,1                | 9      | 1.961,0              | 2      | 60,0                 | 9      | 1.930,0              | 13     | 783,5                | 5      | 3.259,6              | 40     | 8.551,1              |
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta |        |                      | 3      | -                    | 2      | -                    | 1      | -                    | 1      | -                    | 2      | 4.057,5              | 9      | 4.057,5              |
| Daerah Istimewa Yogyakarta    |        |                      | 2      | 4.048,4              |        |                      |        |                      |        |                      |        |                      | 2      | 4.048,4              |
| Jawa Tengah                   |        |                      |        |                      | 1      | 31,0                 | 3      | 611,0                | 10     | 2.232,4              | 3      | 807,3                | 17     | 3.681,7              |
| Banten                        |        |                      |        |                      |        |                      | 5      | 287,7                | 5      | 1.844,9              | 1      | -                    | 11     | 2.132,6              |
| Jawa Timur                    | 1      | 817,4                | 1      | 364,6                | 1      | -                    | 1      | -                    |        |                      |        |                      | 4      | 1.182,0              |
| Kepulauan Riau                | 1      | 1.000,0              |        |                      | 3      | 19,0                 | 2      | -                    | 5      | -                    |        |                      | 11     | 1.019,0              |
| Total(Wilayah)                | 4      | 2.374,5              | 15     | 6.374,0              | 9      | 110,0                | 21     | 2.828,7              | 34     | 4.860,8              | 11     | 8.124,4              | 94     | 24.672,3             |



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-7-

#### LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 93 TAHUN 2014  
TENTANG  
PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU BIDANG KESEHATAN DI  
BADAN KOORDINASI PENANAMAN  
MODAL

#### I. Perizinan Bidang Produksi Farmasi

| No | Sarana/usaha                | Jenis Izin                        | Keterangan                                     |
|----|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|
| 1  | Industri Farmasi Obat       | Persetujuan prinsip               | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes |
|    |                             | Perpanjangan Persetujuan Prinsip  | -                                              |
|    |                             | Izin Industri Farmasi             | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes |
|    |                             | Pembaharuan Izin Industri Farmasi | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes |
|    |                             | Perubahan Izin                    | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes |
| 2  | Industri Farmasi Bahan Obat | Persetujuan prinsip               | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes |
|    |                             | Perpanjangan Persetujuan Prinsip  | -                                              |
|    |                             | Izin Industri Farmasi             | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes |
|    |                             | Pembaharuan Izin Industri Farmasi | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes |
|    |                             | Perubahan Izin                    | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes |



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

-8-

#### II. Perizinan Bidang Produksi Alat Kesehatan

| No | Sarana/usaha            | Jenis Izin                               | Keterangan                                                  |
|----|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1  | Industri Alat Kesehatan | Izin Industri/izin Produksi              | Rekomendasi sertifikat produksi dari Dirjen Binar dan Alkes |
|    |                         | Pembaharuan Izin Industri Alat Kesehatan | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes              |
|    |                         | Perubahan Izin                           | Rekomendasi teknis dari Dirjen Binar dan Alkes              |

#### III. Perizinan Bidang Upaya Kesehatan

| No | Sarana/usaha                      | Jenis Izin       | Keterangan                                          |
|----|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1  | Rumah Sakit Kelas A               | Izin mendirikan  | Rekomendasi teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan |
|    |                                   | Izin operasional | Rekomendasi teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan |
| 2  | Rumah Sakit PMA                   | Izin mendirikan  | Rekomendasi teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan |
|    |                                   | Izin operasional | Rekomendasi teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan |
| 3  | Bank Sel Puncu                    | Izin mendirikan  | Rekomendasi teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan |
|    |                                   | Izin operasional | Rekomendasi teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan |
| 4  | Laboratorium pengolahan Sel Puncu | Izin mendirikan  | Rekomendasi teknis dari Dirjen Bina Upaya Kesehatan |